

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGGUNAAN
2012 - 2016**



**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGGUNAAN
2012 - 2016**

<https://bitungkota.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGELUARAN 2012-2016**

***GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT OF
BITUNG CITY
BY EXPENDITURE 2012 - 2016***

ISSN/ ISSN: -

Nomor Publikasi/ *Publication Number*: 71720.1704

Katalog BPS/ *BPS Catalogue*: 9302003.7172

Ukuran Buku/ *Book Size*: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman/ *Total pages*: viii + 67 halaman

Naskah/ *Script*:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/

Regional Account and Statistical Analysis Section

Gambar Kulit/ *Cover*:

Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh/ *Published By*:

©Badan Pusat Statistik Kota Bitung/

BPS-Statistics of Bitung City

Dicetak Oleh/ *printed By*:

CV. Bahu Bahtera Indah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this book for commercial purposes without the written permission of the Central Bureau of Statistics.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTOKOTA BITUNG
MENURUT PENGGUNAAN 2012- 2016**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Novri Poultje Mokoagow

Editor : Sonia Hajar Marophahita

Penulis : Winanti Apsari, SST, SE, MSi

Pengolah data : Winanti Apsari, SST, SE, MSi

<https://bitungkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini merupakan publikasi pertama yang menyajikan data PDRB Tahun Dasar Baru (2010=100), dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bitung, 18 Agustus 2017
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BITUNG



Ir. Novri P. Mokoagow

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	ix
BAB I Pendahuluan	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	5
BAB II Metode Estimasi dan Sumber Data	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRIT	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	19
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	27
BAB III Tinjauan Ekonomi Menurut PDRB Pengeluaran Bitung	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Pengeluaran Bitung	29
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	36
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRIT	40
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	41
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	44

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	46
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	47
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	48
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	49
BAB IV Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	
Bitung	50
4.1 PDRB (Nominal)	50
4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	52
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB ...	53
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	54
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	55
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	56
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	57
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	58
BAB V Penutup	59
Lampiran	60
Daftar Pustaka	65

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2010-2016.....	31
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2010-2016.....	32
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2010-2016.....	33
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran 2010-2016.....	34
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2010-2016	35
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2010-2016.....	36
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2010-2016.....	38
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2010-2016.....	39
Tabel 9	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2010-2016.....	39
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2010-2016	40
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2010-2016.....	41
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB	44
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori 2010-2016.....	46

Tabel 14	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa 2010-2016.....	47
Tabel 15	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita 2010-2016.....	50
Tabel 16	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2010-2016	52
Tabel 17	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB (ADHB) 2010-2016.....	53
Tabel 18	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB 2010-2016.....	54
Tabel 19	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2010-2016.....	55
Tabel 20	Rasio PDRB terhadap Impor, 2010-2016	56
Tabel 21	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan, 2010-2016.....	57
Tabel 22	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, 2010-2016	58

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2010-2016.....	33

<https://bitungkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran, Kota Bitung (Juta Rp).....	60
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Pengeluaran (Juta Rp)	61
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran Kota Bitung (Persen)	62
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Pengeluaran Kota Bitung (Persen)	63
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Bitung	64
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100), Menurut Pengeluaran Kota Bitung	65

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. **Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah/*region* setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu *region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, demikian pula sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun, dan menghilangkan pengaruh perubahan harga.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu *region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu *region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;

12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya;

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya, diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-RT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Susenas. Untuk menghasilkan penghitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara *deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

- b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke-1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke-2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PK-RT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PK-RT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

<https://bitungkota.bps.go.id>

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *non profit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi

kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara;

Contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

b. Kompensasi tenaga kerja;

Contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya

c. Penyusutan;

d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang

diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

<https://bitungkota.bps.go.id>

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya, sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

- Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota;
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat;
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi);
- d. Laporan keuangan perusahaan;
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang Level Provinsi;
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar;
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan (migas dan non-migas);
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum;
- i. Publikasi Statistik Konstruksi;
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung, sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara:

Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB

adh Konstan tersebut di-*inflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara: *Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Untuk PMTB adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat, sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang

diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu,

minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia.

Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai,

- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Secara umum, aktivitas ekspor-impor antar kabupaten/kota lebih mudah dilakukan dibanding dengan aktivitas ekspor-impor nasional ke luar negeri. Hal ini terjadi antara lain karena :

- transaksi ekspor dan impor antar kabupaten/kota tidak memerlukan izin dan tidak dikenai tarif impor ataupun pajak ekspor;
- jarak antar daerah relatif lebih dekat; dan
- faktor selera masyarakat relatif sama.

Dilihat dari sisi partner transaksi, ekspor-impor kabupaten/kota dapat dilakukan dengan kabupaten/kota lain (ekspor-impor antar kabupaten/kota) atau negara lain (ekspor-impor luar negeri). Kondisi ini membuat transaksi ekspor-impor kabupaten/kota berperan besar dalam pembentukan PDRB. Peran ekspor-impor kabupaten/kota terhadap PDRB diyakini melebihi peran ekspor-impor nasional terhadap PDB. Peranan ekspor-impor kabupaten/kota juga diyakini relatif besar dibandingkan peran komponen lain dalam membentuk PDRB kabupaten/kota.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut. (*United Nations*, 2009: 56).

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kab/kota di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei;
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang, sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen.

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode tak-langsung menggunakan metode cross hauling. Metode ini akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa di suatu kabupaten/kota. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat

keseimbangan permintaan (demand) dan penyediaan (supply) setiap industri/komoditas di suatu perekonomian.

Penghitung ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode commodity balance. Metode commodity balance adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (balancing item) untuk menuju kondisi demand dan supply yang seimbang di suatu perekonomian. Jika supply domestik suatu industri/komoditas di suatu kabupaten/kota melebihi kebutuhan (permintaan antara dan permintaan akhir), maka kabupaten/kota tersebut mengalami surplus dan akan melakukan ekspor. Sebaliknya, jika supply domestik komoditas di suatu kabupaten/kota tidak ada atau kurang, maka kabupaten/kota tersebut akan mengimpor (Kronenberg, 2008).

Asumsi yang digunakan dalam metode commodity balance adalah kelebihan dan kekurangan supply domestik atas demand, sepenuhnya diselesaikan dengan ekspor dan impor. Jika kelebihan supply domestik, maka akan melakukan ekspor, sedangkan jika kekurangan supply domestik, maka akan mengimpor. Hal ini membuat penghitungan ekspor-impor tersebut belum menangkap aspek lain di dalam transaksi ekspor-impor, karena dalam kenyataannya, baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan supply domestik, suatu kabupaten/kota dapat melakukan transaksi ekspor/impor secara bersama. Untuk mengatasi kelemahan ini, penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota perlu untuk disempurnakan dengan menerapkan metode cross hauling.

Metode cross hauling berusaha mengatasi kelemahan metode commodity balance, dengan mengakomodir kemungkinan suatu kabupaten/kota melakukan ekspor-impor komoditas secara bersamaan. Contoh, suatu kabupaten/kota, selain mengekspor komoditas pertanian ke luar daerah/luar negeri, juga melakukan impor komoditas pertanian yang merupakan output dari luar daerah/luar negeri.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA BITUNG

Perubahan struktur ekonomi Kota Bitung akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode tahun 2010-2016, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Bitung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Kondisi perekonomian Kota Bitung menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, 2010 - 2016

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 732	3 082	3 214	3 473	3 779	4 561	4 887
2. Konsumsi LNPRT	86,46	94,46	106,58	110,13	121,46	132,71	144,54
3. Konsumsi Pemerintah	599,14	725,41	786,94	876,08	997,58	1 153	1 246
4. PMTB	2 442	2 793	2 508	2 618	2 646,79	3 114,34	3,473
5. Perubahan Inventori	-87,96	25,50	75,4	14,80	16,19	15,98	8,209
6. Ekspor	7 187	7 930	10 312	10 335	11 043	10 545	11 178
7. Impor	6 114	7 135	8 576	8 046	8 087	7 887	8 254,43
8. Net Ekspor	1 073	796	1 736	2 288	2 956	2 657	2 923,91
Total PDRB	6 846	7 515	8 427	9 381	10 517	11 635	12 683,36

Nilai PDRB Kota Bitung (adh Berlaku) selama periode tahun 2010-2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

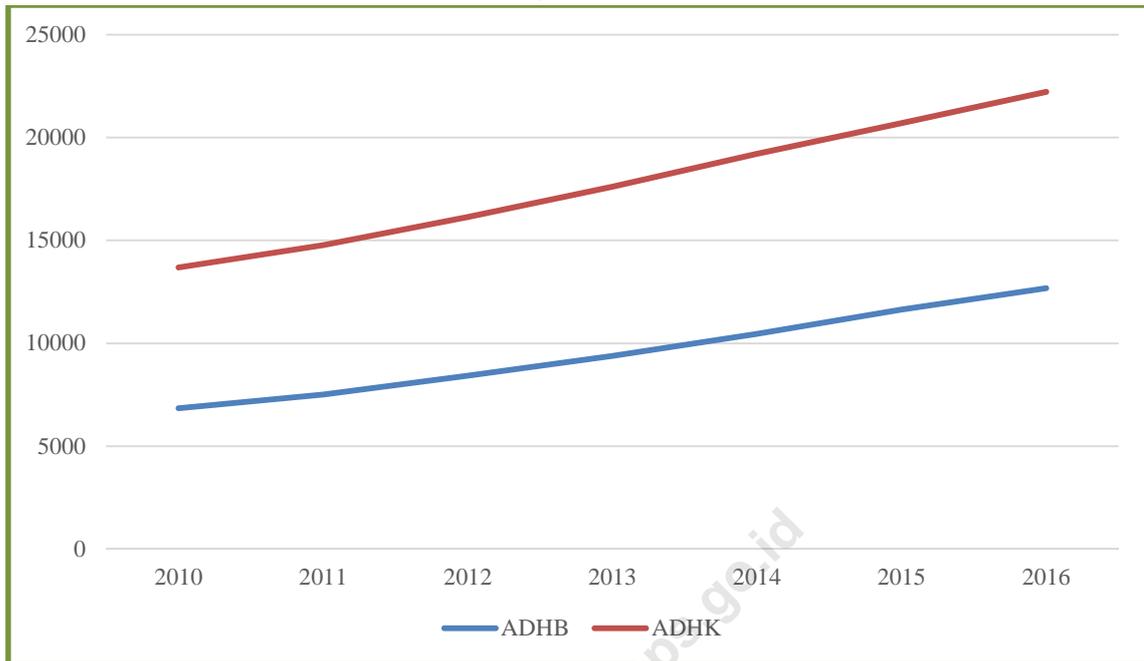
PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Bitung berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, 2010 - 2016

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)						
	2010	2011	2012	2013	2104	2105	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 732	2 881	2 988	3 251	3 377	3 715	3 909
2. Konsumsi LNPRIT	87,46	92,26	98,90	102,78	105,16	105,37	106,43
3. Konsumsi Pemerintah	599	658	703	756	802	882	912
4. PMTB	2 442	2 576	2 603	2 792	2 859	3 129	3 345
5. Perubahan Inventori	-87,96	24,14	61,06	11,72	10,70	13,32	7,01
6. Ekspor	7 187	7 670	8 749	8 572	8 348	8 098	8 276
7. Impor	6 114	6 654	7 487	7 256	6 748	7 877	7 018
8. Net Ekspor	1 073	1 016	1 262	1 315	1 601	1 222	1 257
Total PDRB	6 846	7 248	7 715	8 229	8 754	9 067	9 538

Dari grafik 1, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku, sedangkan dalam PDRB adh Konstan, pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Grafik 1
Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, 2010 - 2016



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor (X), dan impor (M).

Tabel 3
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, 2010 - 2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	39,91	41	38,14	37,02	35,75	39	39
2. Konsumsi LNPRT	1,28	1,26	1,26	1,17	1,16	1,14	1,14
3. Konsumsi Pemerintah	8,75	9,65	9,34	9,34	9,54	9,91	9,83
4. PMTB	35,67	37,16	29,76	27,91	25,22	26,77	27,38
5. Perubahan Inventori	-1,28	0,34	0,89	0,16	0,15	0,13	0,06
6. Ekspor	104,98	105,51	122,38	110,17	105,32	106,23	88,13
7. Impor	89,30	94,92	101,77	85,77	77,14	82,41	65,08
8. Net Ekspor	15,68	10,59	20,60	24,39	28,17	22,84	23,05
Total PDRB	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa selama periode tahun 2010-2016, berkisar 40-50 persen produk yang dikonsumsi di wilayah domestik, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. PMTB yang menjadi gambaran investasi fisik di Kota Bitung menduduki urutan kedua, di kisaran 30-40 persen. Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, produk Kota Bitung mampu menembus pasar luar daerah maupun internasional. Net ekspor antar daerah positif menunjukkan kondisi surplus, yaitu nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Hal ini berarti bahwa Kota Bitung mempunyai andil yang besar sebagai pemasok produk barang dan jasa luar daerah.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dari tahun 2011-2016 secara rata-rata mencapai 3,5-6,6 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,87 persen (2011); 6,45 persen (2012); 6,66 persen (2013); 6,38 persen (2014); 3,57 persen (2015), dan 5,19 persen (2016) . Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,66 persen.

Tabel 4
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, 2010 – 2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,46	3,70	8,83	3,85	65	33
2. Konsumsi LNPRT	5,49	7,20	3,92	2,32	0,20	1,01
3. Konsumsi Pemerintah	9,86	6,81	7,50	6,10	10	3,44
4. PMTB	5,47	1,05	7,27	2,42	9,44	6,91
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor	6,73	14,06	-2,02	-2,60	-3,00	2,19
7. Impor	8,84	12,52	-3,08	-7,01	16,73	2,06
8. Net Ekspor Antar Daerah	-5,28	24,16	4,23	21,74	-23,71	2,92
Total PDRB	5,87	6,45	6,66	6,38	3,57	5,19

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 5).

Tabel 5
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
2010 - 2016

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	106,96	107,56	106,82	111,93	122,78	125,02
2. Konsumsi LNPRT	100,00	102,39	107,77	107,15	115,50	125,95	135,81
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	110,21	111,93	115,91	124,40	130,72	136,59
4. PMTB	100,00	108,45	96,36	93,79	92,57	99,52	103,82
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor	100,00	103,39	117,87	120,57	132,26	130,21	135,07
7. Impor	100,00	107,22	114,55	110,89	119,85	114,70	117,61
8. Net Ekspor	100,00	78,32	137,57	173,96	183,98	208,60	232,53
Total PDRB	100,00	103,70	109,22	114	119,41	128,30	132,98

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2010 – 2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi Rumah Tangga							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2 732	3 082	3 214	3 473	3 737	4 561	4 887
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2 732	2 881	2 988	3 251	3 377	3 715	3 909
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	39,91	41	38,14	37,02	35,75	39,20	38,53
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)							
a. ADHB	55 051	65 683	67 273	71 425	75 554	90 653	96 542
b. ADHK 2010	55 051	61 409	62 544	66 864	68 267	73 832	77 220
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun (<i>Ribu Rp</i>)							
a. ADHB	14 510	16 067	16 456	17 472	18 481	22 179	23 384
b. ADHK 2010	14 510	15 022	15 299	16 356	16 699	18 064	18 703
<u>Pertumbuhan</u>							
a. Total konsumsi RT		5,46	3,70	8,83	3,85	65	33,26
b. Per RT		11,55	1,85	6,91	2,10	8,15	4,59
c. Per kapita		3,53	1,85	6,91	2,10	8,17	3,54
Jumlah RT (<i>unit</i>)	49627	46919	47771	48628	49462	50320	50621
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	188290	191806	529119	198794	202204	205675	208995

Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2016, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), dan sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010-2015 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 41 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 35,75 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Kota Bitung menghabiskan dana sekitar 55 juta rupiah setahun, untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 65,6 juta rupiah (2011); 67,3 juta rupiah (2012); 71,4 juta rupiah (2013); 75,6 juta rupiah (2014), dan menjadi 91,1 juta rupiah (2015).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan 2010*, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh di kisaran 2-12 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2011, yakni sebesar 11,55 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Bitung meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” berkisar antara 2-8 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* di tahun 2011 adalah sebesar 5,46 persen. Kemudian meningkat pada tiga tahun berikutnya, yaitu berturut-turut sebesar 3,70 persen (2012); 8,83 persen (2013); 3,85 persen (2014); dan 9,8 persen (2015). Sementara itu, konsumsi per kapita tumbuh 3,53 persen ditahun 2011; 1,85 persen di tahun 2012; 6,91 persen di tahun 2013; 2,10 persen di tahun 2014; dan 7,97 persen di tahun 2015. Terlihat bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan terjadi

perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2010-2015, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Bitung, bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan.

Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung berada di kisaran yang sama, yaitu 45,60 persen (2010); 44,90 persen (2011); 43,49 persen (2012); 42,52 persen (2013); 41,71 persen (2014); dan 40,27 persen (2015).

Tabel 7
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2010 - 2016

Kelompok Konsumsi	(Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Makanan, Minuman, & Rokok	45,60	44,90	43,49	42,52	41,24	40,49	43,34
b. Pakaian & Alas Kaki	0,27	0,29	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,26	7,65	7,93	7,80	7,78	7,88	7,72
d. Kesehatan & Pendidikan	4,10	4,72	4,66	4,44	4,49	4,42	4,45
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	37,79	37,28	37,90	39,27	40,08	41,05	38,51
f. Hotel & Restoran	3,17	3,19	3,42	3,45	3,72	3,66	3,52
g. Lainnya	1,81	1,97	2,42	2,29	2,46	2,27	2,24
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 1,67 persen (2011); 0,85 persen (2012); 7,62 persen (2013); 1,44 persen (2014); dan 7,76 persen (2015).

Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 8
Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2010 – 2016

Kelompok Konsumsi	(Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, & Rokok	1,67	0,85	7,62	1,44	7,54	8,77
b. Pakaian & Alas Kaki	0,78	3,78	10,72	5,70	9,33	8,04
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,80	4,24	17,99	3,51	12,55	1,40
d. Kesehatan & Pendidikan	6,57	7,23	6,98	7,36	8,44	4,94
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, & Budaya	7,73	5,10	8,55	5,18	12,68	2,75
f. Hotel & Restoran	10,79	10,19	10,19	10,29	8,19	2,40
g. Lainnya	25,14	17,85	6,90	9,79	6,50	4,97

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9 menunjukkan fluktuasi harga setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2011, dan pada tahun-tahun berikutnya pergerakan harga berfluktuasi.

Tabel 9
Pertumbuhan Indeks Implisit
Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2010 – 2016

Kelompok Konsumsi	(Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,23	0,15	-1,80	4,04	10,18	5,44
b. Pakaian dan Alas Kaki	19,67	-35,21	13,94	5,09	7,67	1,26
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,31	3,60	-9,81	4,75	8,66	3,50
d. Kesehatan & Pendidikan	21,94	-3,94	-3,68	2,37	9,67	2,71
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,30	0,85	3,16	5,61	9,70	2,20
f. Hotel & Restoran	2,47	1,56	-1,09	6,39	9,73	0,58
g. Lainnya	-1,89	8,83	-4,17	6,52	4,61	0,41

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan proporsinya terhadap PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun 2010-2015 hanya berada di kisaran 1 persen.

Tabel 10
Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi LNPRT							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	86,46	94,46	106,58	110,13	121,46	132,71	144,54
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	87,46	92,26	98,90	102,78	105,16	105,37	106,43
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,28	1,26	1,26	1,17	1,16	1,14	1,14

Berdasarkan tabel 10, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010, selama periode tahun 2010-2015, tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan-kegiatan non profit tidak terlalu berkembang subur di Kota Bitung, sesuai dengan karakteristik kota Bitung yang merupakan daerah perkotaan dimana masyarakatnya cenderung lebih individualistis dan tidak terlalu aktif dalam kegiatan sosial akibat kesibukan dan tuntutan pekerjaan sehari-hari. Jumlah lembaga non profit yang melayani rumah tangga juga tidak meningkat signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Bitung serta perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi Pemerintah							
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	599,14	725,41	786,94	876,08	997,58	1 153	1 246
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	599	658	703	756	802	882	912
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,75	9,65	9,34	9,34	9,54	9,91	9,83
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)							
a. ADHB	3182	3782	4030	4407	4934	5607	5964
b. ADHK 2010	3182	3432	3600	3802	3966	4289	4366
<u>Pertumbuhan</u>							
a. Total konsumsi pemerintah	-	9,86	6,81	7,50	6,10	10	3,44
b. Konsumsi per kapita	-	7.85	4.91	5.61	4.31	8,14	1,80
<u>Jumlah Pegawai Pemerintah</u>	4 485	3 182	4 046	3 928	3 928	3 795	3 749
<u>Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)</u>	188290	191806	195291	198794	202204	205675	208995

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 0,6 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2015 nilainya mencapai 1,1 triliun rupiah.

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan di masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 8,75 persen di tahun 2010 menjadi 9,83 persen di tahun 2015. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi di tahun 2010, sedangkan proporsi tertinggi di tahun 2015, yakni mencapai 9,83 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per kapita adh Berlaku senilai 599,14 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 9,86 persen di tahun 2011; 6,81 persen (2012); 7,50 persen (2013); 6,10 persen (2014); dan 8,49 persen (2015).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 133,58 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2011 dan 2013, yaitu masing-masing sebesar 54,85 persen dan 10,73 persen.

Jumlah pegawai pemerintah dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Penurunan jumlah pegawai pemerintah terjadi berkenaan dengan adanya kebijakan moratorium CPNS di tahun 2011. Pada tahun 2010 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 4485. orang dan menurun menjadi 3182 orang di tahun 2011. Tahun 2012 jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan, yaitu 4046 orang dan kembali menurun menjadi 3 928 orang (2012). Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan

peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 9,86 persen; untuk konsumsi per kapita 7,85 persen; sedangkan untuk konsumsi per pegawai pertumbuhan sebesar 54,85 persen.

Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung menurun dengan masing-masing adalah 42 (2010); 60 (2011); 48 (2012); 51 (2013); 30 (2014); dan 40 (2015) . Hal ini berarti rata-rata setiap tahun, selama periode 2010-2015, setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 50 penduduk.

<https://bitungkota.bps.go.id>

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 12
Perkembangan dan Struktur PMTB
2010 – 2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total PMTB							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2 442	2 793	2 508	2 618	2 646	3 114	3 473
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2 442	2 576	2 603	2 792	2 859	3 129	3 345
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	35,67	37,16	29,76	27,91	25,22	25,66	
Struktur PMTB							
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	1 891	2 308	2 011	2 202	2 286	2 645	2 843
(%)	77,45	82,63	80,19	79,47	79,55	86,40	
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	551	485	591	590	573	484	502
(%)	22,55	17,37	19,81	20,53	20,45	13,60	
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	2 442	2 793	2 508	2 618	2 646	3 114	3 473
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)							
a. Bangunan	-	22,02	-5,22	9,46	3,82	15,68	7,50
b. Non Bangunan	-	-11,89	30,41	-0,18	-2,82	-15,46	3,68
Total PMTB	-	5,47	1,05	7,27	2,42	9,44	6,91

Selain fluktuasi yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan fluktuasi baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa 5,47 persen (2011); 1,05 persen (2012); 7,27 persen (2013); 2,42 persen (2014); 9,44 persen (2015) dan menjadi 6,91 persen (2016).

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2010-2016 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut.

Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2016 positif dan mengalami peningkatan yaitu 3,68 persen..

<https://bitungkota.bps.go.id>

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
2010 - 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Nilai Inventori							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	-87,96	25,50	75,4	14,80	16,19	15,98	8,21
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	-87,96	24,14	61,06	11,72	10,70	13,32	7,01
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-1,28	0,34	0,89	0,16	0,15	0,14	0,06

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Dilihat adh Berlaku, di tahun 2010 perubahan inventori tercatat sebesar minus 87,96 miliar rupiah, 25,50 miliar rupiah (2011), 75,4 miliar rupiah (2012), 14,80 miliar rupiah (2013), 16,19 miliar rupiah (2014), dan 15,58 miliar rupiah (2015). Proporsi komponen ini terhadap total PDRB juga sangat kecil, di bawah 1 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 14
Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa
2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Nilai Ekspor Luar Negeri							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	7 187	7 930	10 312	10 335	11 010	10 545	11 178
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	7 187	7 670	8 749	8 572	8 348	6 877	7 018
Proporsi terhadap PDRB (<i>% - ADHB</i>)	104,98	105,51	122,38	110,17	105,32	90,63	88,13
Total ekspor	-	6,73	14,06	-2,02	-2,60	-3,00	2,19

Secara total, nilai ekspor selama periode 2010-2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, ekspor Kota Bitung tercatat senilai 7 187 miliar rupiah dan terus meningkat menjadi 7 930 milyar rupiah di tahun 2012. Di tahun 2013, nilai ekspor menjadi 10 312 milyar rupiah, meningkat kembali menjadi 11 010 milyar rupiah, dan terus meningkat menjadi 12 358 di tahun 2015. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat, kecuali pada 2 tahun yaitu 2013 dan 2014 mengalami pertumbuhan negated, dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 7 187 miliar rupiah (2010); 7 670 miliar rupiah (2011); 8 749 miliar rupiah (2012); 8 572 miliar rupiah (2013); 8 348 miliar rupiah (2014), dan 9 025 miliar rupiah (2015).

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Sulawesi Utara. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Bitung terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Bitung di luar daerah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 16 menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kota Bitung pada periode tahun 2010-2015 cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Namun pada tahun 2013 dan 2014 nilai impor adh konstan 2010 mengalami penurunan yakni dari 7,7 triliun rupiah di tahun 2012 menjadi 7,3 triliun rupiah di tahun 2013 dan 6,7 triliun rupiah di tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai impor kembali mengalami peningkatan.

Proporsi impor terhadap PDRB sangat berfluktuasi. Pada tahun 2010 proporsinya sebesar 89,30 persen, dan meningkat menjadi 94,92 persen. Tahun-tahun berikutnya proporsinya sebesar 101,77 persen (2012); 85,77 persen (2013); 77,14 persen (2014); dan 82,41(2015)

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2015 sebesar 16,73 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan impor turun menjadi minus 3,08 persen (2013) dan minus 7,01 (2014).

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda **“positif”** berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 15
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita
2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)							
- ADHB	6 845,77	7 516,34	8 426,73	9 381,78	10 517	11 635	12 683,36
- ADHK 2010	6 845,77	7 247,82	7 715,40	8 229,03	8 754	9 067	9 538
2016PDRB per kapita (<i>Ribu Rp</i>)							
- ADHB	36 357	39 187	43 149	47 189	52 014	56 571	60 687
- ADHK 2010	36 357	37 787	39 507	41 395	43 299	44 084	45 636
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	-	3,93	4,55	4,78	4,59	1,81	3,52
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	188,29	191,81	195,29	198,79	202,20	205,68	208,99
Pertumbuhan	-	1,24	1,20	2,22	2,94	1,72	1,61

PDRB per kapita Kota Bitung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bitung rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu positif, walaupun di tahun 2015 ada terjadi perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1-2 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

<https://bitungkota.bps.go.id>

4.2 PERBANDINGAN PDRB PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDB Indonesia (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 16
Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2010 - 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	2 732	3 082	3 214	3 473	3 779	4 561	4 887
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 187	7 931	10 312	10 335	11 043	10 545	11 178
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	38,02	38,86	31,16	33,61	34,22	43,26	43,72

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga hanya 38,02 dari yang diekspor. Hal ini menunjukkan juga besarnya permintaan (*demand*) domestik tidak seberapa dibandingkan aktivitas ekspor yang dilakukan baik ekspor antar daerah maupun ekspor Luar Negeri. Pada data *series* diatas terlihat bahwa rasio berada diatas 33 persen. Penurunan rasio yang relatif tajam lebih disebabkan karena laju kenaikan nilai konsumsi rumah tangga lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan nilai ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Sulawesi Utara digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 17
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB (ADHB)
2010 - 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi RT (<i>Miliar Rp</i>)	2 732	3 082	3 214	3 473	3 779	4 561	4 887
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	2 442	2 793	2 508	2 618	2 646,8	3 114,3	3,473
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,12	1,10	1,28	1,33	1,42	1,46	1,41

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 1,12 di tahun 2010; 1,12 di tahun 2011; 1,28 di tahun 2012; 1,33 di tahun 2013; dan 1,42 di tahun 2014, dan 1,54 di tahun 2015. Kenaikan rasio ini terjadi karena pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga bertambah lebih banyak dibandingkan PMTB.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRIT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

Tabel 18
Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi Akhir (ADHB) <i>Miliar Rp</i>							
a. Rumah tangga	2 732	3 082	3 214	3 473	3 779	4 561	4 887
b. LNPRIT	87	94	107	110	121,46	132,71	144,54
c. Pemerintah	599	725	787	876	997,58	1 153	1 246
J u m l a h	3 418	3 902	4 107	4 459	4 899	5 847	6 278
PDRB (ADHB) <i>Miliar Rp</i>	6 845,77	7 516,34	8 426,73	9 381,78	10 517	11 635	¹² 683,36
Proporsi	49,93	51,91	48,74	47,54	46,58	50,26	49,50

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 19
Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 187	7 931	10 312	10 335	11 043	10 545	11 178
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	2 442	2 793	2 508	2 618	2 646,79	3 114,34	3,473
Rasio Ekspor terhadap PMTB	2,94	2,85	4,11	3,95	4,18	3,38	3,22

Selama periode 2010-2016, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (tabel 19). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 20
Rasio PDRB terhadap Impor, 2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PDRB (ADHB)							
(Miliar Rp)	6 845,77	7 516,34	8 426,73	9 381,78	10 517	11 635	12 683,36
Total Impor (ADHB)							
(Miliar Rp)	6 114	7 135	8 576	8 046	8 087	7 887	8 254,43
Rasio PDRB terhadap Impor	1,12	1,05	0,98	1,17	1,30	1,48	1,54

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010 - 2016 menunjukkan keadaan yang berfluktuasi). Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2016 (1,54), lebih disebabkan peningkatan PDRB, dan nilai impor juga meningkat. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor, dan sebaliknya.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel 21, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar provinsi, dengan rentang diatas 40 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 60 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 12,96 triliun rupiah (2010) menjadi sebesar 20,94 triliun rupiah (2016).

Tabel 21
Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
2010 - 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Total Penyediaan</u>							
PDRB (ADHB) Miliar Rp	6 845,77	7 516,34	8 426,73	9 381,78	10 517	11 635	12 683,36
%	52,83	51,30	49,56	53,58	56,53	59,60	60,58
Total Impor (ADHB) Miliar Rp	6 114	7 135	8 576	8 046	8 087	7 887	8 254,43
%	47,17	48,70	50,44	46,17	43,47	40,40	39,42
Total Permintaan Akhir (Miliar Rp)	12 959	14 651	17 003	17 427	18 605	19 523	20 938
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **“Ekspor Neto”**. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit.

Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 22
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, 2010 - 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 187	7 931	10 312	10 335	11 043	10 545	11 178
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	6 114	7 135	8 576	8 046	8 087	7 887	8 254,4
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	1 073	796	1 736	2 288	2 956	2 657	2 923,9
Rasio ekspor thd impor	1,18	1,11	1,20	1,28	1,37	1,34	1,35

Selama periode 2010-2016, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Bitung dengan luar negeri dan antar daerah, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Bitung selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk.

1. PDRB menurut Pengeluaran tahun 2012 s.d 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bitung pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2010-2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Bitung terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.213.719,52	3.473.269,95	3.779.528,02	4.561.638,87	4.887.037
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.397.571,37	1.476.932,81	1.558.792,37	1.847.067,24	2.118.275
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6.019,14	7.593,34	8.434,88	9.929,42	10.862,69
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	254.742,74	271.071,39	293.897,50	359.440,70	377.226,47
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	149.802,06	154.364,71	169.657,87	201.768,82	217.490,61
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.217.857,59	1.363.788,40	1.514.948,96	1.872.679,77	1.881.832,87
1.f. Hotel dan Restoran	109.986,43	119.878,67	140.659,14	166.987,62	171.977,44
1.g. Lainnya	77.740,21	79.640,64	93.137,30	103.765,31	109.372,25
			-		
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	106.584	110.132	121.462	132.713,87	144.536,62
			-		
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	786.941	876.077	997.583	1.153.126	1.246.378,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.507.862	2.618.448	2.646.785	3.114.339	3.473.292
4.a. Bangunan	2.010.952,88	2.080.807,40	2.097.548	2.688.793,96	3.019.610,23
4.b. Non-Bangunan	496.909	537.641	549.237	425.545,15	453.681,36
			-		
5. Perubahan Inventori	75.396	14.797,21	16.189,46	15.983,68	8.209,45
			-		
6. Ekspor	10.312.429,89	10.334.756,06	11.042.977	10.544.922	11.178.337,41
			-		
7. Impor	8.576.207	8.046.408	8.087.100	7.887.362	8.254.431,00
PDRB (1 s.d 7)	8.426.726	9.381.073	10.517.425	11.635.361	12.683.360

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2.987.797	3.251.481	3.376.643	3.715.239	3.908.932
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.277.551	1.374.849	1.394.682	1.499.852	1.631.333
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7.763	8.595	9.085	9.933	10.731
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	227.028	267.871	277.263	312.063	316.421
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	127.882	136.811	146.878	159.277	167.151
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.169.076	1.269.065	1.334.842	1.504.144	1.545.466
1.f. Hotel dan Restoran	105.686	116.455	128.438	138.957	142.288
1.g. Lainnya	72.811	77.835	85.455	91.013	95.541
					-
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	98.900	102.779	105.163	105.369	106.429
					-
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	703.055	755.815	801.906	882.103	912.483
					-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.602.555	2.791.878	2.859.375	3.129.278	3.345.480
4.a. Bangunan	2.011.840	2.202.227	2.286.352	2.644.822	2.843.203
4.b. Non-Bangunan	590.715	589.652	573.023	484.456	502.277
					-
5. Perubahan Inventori	61.062	11.720	10.700	13.316	7.007
					-
6. Ekspor	8.748.702	8.571.724	8.349.256	8.098.418	8.275.793
					-
7. Impor	7.486.670	7.256.246	6.747.738	6.876.684	7.018.340
					-
PDRB (1 s.d 7)	7.715.400	8.229.152	8.755.305	9.067.039	9.537.784

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	38,14	37,02	35,94	39	39
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	16,58	15,74	14,82	15,87	16,70
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	3,02	2,89	2,79	3,09	2,97
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,78	1,65	1,61	1,73	1,71
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,45	14,54	14,40	16,09	14,84
1.f. Hotel dan Restoran	1,31	1,28	1,34	1,44	1,36
1.g. Lainnya	0,92	0,85	0,89	0,89	0,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,26	1,17	1,15	1,14	1,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,34	9,34	9,49	9,91	9,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,76	27,91	25,17	26,77	27,38
4.a. Bangunan	23,86	22,18	19,94	23,11	23,81
4.b. Non-Bangunan	5,90	5,73	5,22	3,66	3,58
5. Perubahan Inventori	0,89	0,16	0,15	0,14	0,06
6. Ekspor	122,38	110,17	105,00	90,63	88,13
7. Impor	101,77	85,77	76,89	67,79	65,08
PDRB (1 s.d 7)	100,00	100,00	100,00	100	100

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,70	8,83	3,85	65	33
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,85	7,62	1,44	7,54	8,77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,78	10,72	5,70	9,33	8,04
1.c. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	4,24	17,99	3,51	12,55	1,40
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,23	6,98	7,36	8,44	4,94
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,10	8,55	5,18	12,68	2,75
1.f. Hotel dan Restoran	10,19	10,19	10,29	8,19	2,40
1.g. Lainnya	17,85	6,90	9,79	6,50	4,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,20	3,92	2,32	0,20	1,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,81	7,50	6,10	10,00	3,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,05	7,27	2,42	9,44	6,91
4.a. Bangunan	-5,22	9,46	3,82	15,68	7,50
4.b. Non-Bangunan	30,41	-0,18	-2,82	-15,46	3,68
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	14,06	-2,02	-2,60	-3,00	2,19
7. Impor	12,52	-3,08	-7,01	1,91	2,06
PDRB (1 s.d 7)	6,45	6,66	6,39	3,56	5,19

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 5
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	107,56	106,82	111,93	122,78	125,02
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	109,39	107,43	111,77	123,15	129,85
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	77,54	88,35	92,84	99,97	101,23
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	112,21	101,19	106,00	115,18	119,22
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	117,14	112,83	115,51	126,68	130,12
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	104,17	107,46	113,49	124,50	121,76
1.f. Hotel dan Restoran	104,07	102,94	109,51	120,17	120,87
1.g. Lainnya	106,77	102,32	108,99	114,01	114,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	107,77	107,15	115,50	125,95	135,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	111,93	115,91	124,40	130,72	136,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	96,36	93,79	92,57	99,52	103,82
4.a. Bangunan	99,96	94,49	91,74	101,66	106,20
4.b. Non-Bangunan	84,12	91,18	95,85	87,84	90,32
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	117,87	120,57	132,26	130,21	135,07
7. Impor	114,55	110,89	119,85	114,70	117,61
PDRB (1 s.d 7)	109,22	114,00	120,13	128,33	132,98

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 6
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit
Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kota Bitung

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	0,56	-0,69	4,78	9,69	1,82
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,15	-1,80	4,04	10,18	5,44
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-35,21	13,94	5,09	7,67	1,26
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	3,60	-9,81	4,75	8,66	3,50
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-3,94	-3,68	2,37	9,67	2,71
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,85	3,16	5,61	9,70	-2,20
1.f. Hotel dan Restoran	1,56	-1,09	6,39	9,73	0,58
1.g. Lainnya	8,83	-4,17	6,52	4,61	0,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,25	-0,57	7,79	9,05	7,82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,56	3,56	7,32	5,08	4,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-11,14	-2,67	-1,30	7,52	4,32
4.a. Bangunan	-8,07	-5,47	-2,90	10,81	4,47
4.b. Non-Bangunan	-21,47	8,39	5,12	-8,36	2,83
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	14,00	2,29	9,70	-1,55	3,73
7. Impor	6,84	-3,20	8,08	-4,30	2,54
PDRB (1 s.d 7)	5,32	4,38	5,38	13	17

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

-Enlighten the Nations-

<https://bitungkota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG

BPS - Statistics of Bitung City

Jl. Stadion Duasudara, Manembonembo, Kota Bitung

Telp. (0438) 31269 Email : bps7172@bps.go.id

Homepage: <https://bitungkota.bps.go.id>